

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

PERNYATAAN NO. 02 LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS

Daftar Isi

	Paragraf
Pendahuluan	1-5
Tujuan	1-2
Ruang lingkup	3-4
Manfaat informasi realisasi anggaran.....	5-6
Definisi	7
Struktur Laporan Realisasi Anggaran.....	8-9
Periode Pelaporan	10
Tepat Waktu	11
Isi Laporan Realisasi Anggaran	12-15
Informasi yang disajikan dalam Laporan Realisasi	
Anggaran atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan	16-17
Akuntansi Anggaran	18-20
Akuntansi Pendapatan-LRA	21-30
Akuntansi Belanja	31-46
Akuntansi Surplus/Defisit-LRA	47-49
Akuntansi Pembiayaan	50
Akuntansi Penerimaan Pembiayaan	51-54
Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan	55-57
Akuntansi Pembiayaan Neto	58-59
Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	60-62
Transaksi Dalam Mata Uang Asing	63-66
Tanggal Efektif	67-68

Lampiran :

Ilustrasi Lampiran PSAP 02.A	:	Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat
Ilustrasi Lampiran PSAP 02.B	:	Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi
Ilustrasi Lampiran PSAP 02.C	:	Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

PERNYATAAN NO.02

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BERBASIS KAS

Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

3. Pernyataan Standar ini diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

4. Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap entitas pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan negara/daerah.

Manfaat Informasi Realisasi Anggaran

5. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- (a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- (b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

6. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:

- (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
- (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
- (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

DEFINISI

7. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Standar dengan pengertian:

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPR/DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan

1 *perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban*
2 *berupa laporan keuangan.*

3 *Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh*
4 *Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah*
5 *dan membayar seluruh pengeluaran daerah.*

6 *Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh*
7 *Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung*
8 *seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara.*

9 *Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,*
10 *aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas*
11 *pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.*

12 *Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.*

13 *Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan*
14 *anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi*
15 *instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Rekening Kas Umum*
16 *Negara/Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode*
17 *otorisasi tersebut.*

18 *Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum*
19 *Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun*
20 *anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu*
21 *dibayar kembali oleh pemerintah.*

22 *Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar*
23 *kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun*
24 *anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang*
25 *dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup*
26 *defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.*

27 *Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian*
28 *modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.*

29 *Perusahaan negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian*
30 *modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.*

31 *Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang*
32 *negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum*
33 *Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar*
34 *seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.*

35 *Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang*
36 *daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung*
37 *seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah*
38 *pada bank yang ditetapkan.*

1 **Saldo Anggaran Lebih** adalah gunggung saldo yang berasal dari
2 akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun
3 berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

4 **Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)** adalah selisih
5 lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta
6 penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu
7 periode pelaporan.

8 **Surplus/defisit-LRA** adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan
9 belanja selama satu periode pelaporan.

10 **Transfer** adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan
11 dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana
12 bagi hasil.

13 STRUKTUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN

14 8. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi
15 pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan,
16 yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu
17 periode.

18 9. Dalam Laporan Realisasi Anggaran harus diidentifikasi secara
19 jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu,
20 informasi berikut:

- 21 (a) nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- 22 (b) cakupan entitas pelaporan;
- 23 (c) periode yang dicakup;
- 24 (d) mata uang pelaporan; dan
- 25 (e) satuan angka yang digunakan.

26 PERIODE PELAPORAN

27 10. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali
28 dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah
29 dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode
30 yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan
31 informasi sebagai berikut:

- 32 (a) alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;
- 33 (b) fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi
34 Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

35 TEPAT WAKTU

36 11. Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan
37 tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas
38 operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan

entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

12. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

13. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- (a) ***Pendapatan-LRA;***
- (b) ***Belanja;***
- (c) ***Transfer;***
- (d) ***Surplus/defisit-LRA;***
- (e) ***Penerimaan pembiayaan;***
- (f) ***Pengeluaran pembiayaan;***
- (g) ***Pembiayaan neto; dan***
- (h) ***Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA).***

14. Pos, judul, dan sub jumlah lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan ini, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Realisasi Anggaran secara wajar.

15. Contoh format Laporan Realisasi Anggaran disajikan dalam ilustrasi PSAP 02.A, 02.B, dan 02.C standar ini. Ilustrasi merupakan contoh dan bukan merupakan bagian dari standar. Tujuan ilustrasi ini adalah memberikan gambaran penerapan standar untuk membantu dalam klarifikasi artinya.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

16. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

17. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran. Klasifikasi belanja menurut

organisasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau di Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

AKUNTANSI ANGGARAN

18. Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

19. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

20. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

Akuntansi Pendapatan-LRA

21. Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

22. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

23. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

24. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

25. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

26. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

27. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

28. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode

1 *penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-*
2 *LRA pada periode yang sama.*

3 *29. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-*
4 *recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode*
5 *sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada*
6 *periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.*

7 30. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan
8 pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian
9 bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

10 **AKUNTANSI BELANJA**

11 *31. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas*
12 *Umum Negara/Daerah.*

13 *32. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya*
14 *terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan*
15 *oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.*

16 *33. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu*
17 *pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan*
18 *umum.*

19 *34. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja),*
20 *organisasi, dan fungsi.*

21 35. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan
22 pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk
23 pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga,
24 subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk
25 pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal,
26 bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

27 36. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-
28 hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja
29 operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi,
30 hibah, bantuan sosial.

31 37. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap
32 dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja
33 modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan
34 bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

35 38. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk
36 kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti
37 penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga
38 lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan
39 pemerintah pusat/daerah.

39. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi:

- Belanja Pegawai	xxx
- Belanja Barang	xxx
- Bunga	xxx
- Subsidi	xxx
- Hibah	xxx
- Bantuan Sosial	xxx

Belanja Modal

- Belanja Aset Tetap	xxx
- Belanja Aset Lainnya	xxx
- Belanja Lain-lain/Tak Terduga	xxx
Transfer	xxx

40. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

41. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat provinsi/kabupaten/ kota, dan lembaga teknis daerah provinsi/kabupaten/kota.

42. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

43. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:

Belanja :

- Pelayanan Umum	xxx
- Pertahanan	xxx
- Ketertiban dan Keamanan	xxx
- Ekonomi	xxx
- Perlindungan Lingkungan Hidup	xxx
- Perumahan dan Permukiman	xxx
- Kesehatan	xxx

1	- Pariwisata dan Budaya	xxx
2	- Agama	xxx
3	- Pendidikan	xxx
4	- Perlindungan sosial	xxx

5 **44. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi**
6 **yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.**

7 **45. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja)**
8 **yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai**
9 **pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode**
10 **berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-**
11 **LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.**

12 46. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan
13 pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk
14 keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi
15 belanja tersebut.

16 **AKUNTANSI SURPLUS/DEFISIT-LRA**

17 **47. Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode**
18 **pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA.**

19 48. Surplus-LRA adalah selisih lebih antara pendapatan-LRA dan belanja
20 selama satu periode pelaporan.

21 49. Defisit-LRA adalah selisih kurang antara pendapatan-LRA dan belanja
22 selama satu periode pelaporan.

23 **AKUNTANSI PEMBIAYAAN**

24 50. Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah,
25 baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima
26 kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk
27 menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan
28 pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi.
29 Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran
30 kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan
31 modal oleh pemerintah.

32 **AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN**

33 51. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas
34 Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan
35 obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan
36 kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi
37 permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

1 **52. *Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening***
2 ***Kas Umum Negara/Daerah.***

3 **53. *Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas***
4 ***bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat***
5 ***jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).***

6 54. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang
7 bersangkutan.

8 **AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN**

9 55. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas
10 Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga,
11 penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam
12 periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

13 **56. *Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari***
14 ***Rekening Kas Umum Negara/Daerah.***

15 57. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang
16 bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di
17 pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat
18 sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

19 **AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETO**

20 58. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah
21 dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

22 **59. *Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran***
23 ***pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.***

24 **AKUNTANSI SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN ANGGARAN** 25 ***(SILPA/SIKPA)***

26 60. SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan
27 dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

28 **61. *Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan Belanja,***
29 ***serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode***
30 ***pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.***

31 62. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan
32 dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

33 **TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING**

34 **63. *Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata***
35 ***uang rupiah.***

1 **64. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan**
2 **yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing**
3 **tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah**
4 **berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.**

5 **65. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang**
6 **digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan**
7 **rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah**
8 **berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk**
9 **memperoleh valuta asing tersebut.**

10 **66. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang**
11 **digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan**
12 **mata uang asing lainnya, maka:**

13 (a) **Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan**
14 **dengan menggunakan kurs transaksi;**

15 (b) **Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah**
16 **berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.**

17 **TANGGAL EFEKTIF**

18 **67. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) ini berlaku**
19 **efektif untuk laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran**
20 **mulai Tahun Anggaran 2010.**

21 **68. Dalam hal entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini,**
22 **entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrua**
23 **paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.**

PEMERINTAH PUSAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realis asi 20X0
1	<u>PENDAPATAN</u>				
2	Pendapatan Perpajakan				
3	Pendapatan Pajak Penghasilan	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
7	Pendapatan Cukai	xxx	xxx	xx	xxx
8	Pendapatan Bea Masuk	xxx	xxx	xx	xxx
9	Pendapatan Pajak Ekspor	xxx	xxx	xx	xxx
10	Pendapatan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
11	Jumlah Pendaptan Perpajakan (3 sd 10)	xxx	xxx	xx	xxx
12					
13	Pendapatan Negara Bukan Pajak				
14	Pendapatan Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
15	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	xxx	xxx	xx	xxx
16	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
17	Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (14 s/d 16)	xxx	xxx	xx	xxx
18					
19	Pendapatan Hibah				
20	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
21	Jumlah Pendapatan Hibah (20 s/d 20)	xxx	xxx	xx	xxx
22	Jumlah Pendapatan (11 + 17 + 21)	xxx	xxx	xx	xxx
23					
24	<u>BELANJA</u>				
25	Belanja Operasi				
26	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx

27	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
28	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
29	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
30	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
31	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
32	Belanja Lain-lain	xxx	xxx	xx	xxx
33	Jumlah Belanja Operasi (26 s/d 32)	xxx	xxx	xx	xxx
34					
35	Belanja Modal				
36	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
37	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
38	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
39	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
40	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
41	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
42	Jumlah Belanja Modal (36 s/d 41)	xxx	xxx	xx	xxx
43	JUMLAH BELANJA (33 + 42)	xxx	xxx	xx	xxx
44					
45	TRANSFER				
46	Dana Perimbangan	xxx	xxx	xx	xxx
47	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
48	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
49	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
50	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
51	Jumlah Dana Perimbangan (47 s/d 50)	xxx	xxx	xx	xxx
52					
53	Transfer Lainnya (disesuaikan dengan program yang ada)				
54	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
55	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
56	Jumlah Transfer Lainnya (54 s/d 55)	xxx	xxx	xx	xxx
57	Jumlah Transfer (51 + 56)	xxx	xxx	xx	xxx
58	Jumlah Belanja Dan Transfer (43 + 57)	xxx	xxx	xx	xxx
59					
60	SURPLUS / DEFISIT (22 - 58)	xxx	xxx	xxx	xxx
61	<u>PEMBIAYAAN</u>				
62	Penerimaan				
63	Penerimaan Pembiayaan				
64	Penggunaan SAL	xxx	xxx	xx	xxx
65	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx	xx	xxx
66	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
67	Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
68	Penerimaan dari Divestasi	xxx	xxx	xx	xxx
69	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada				

70	Perusahaan Negara Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
71	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (64 s/d 70)	xxx	xxx	xx	xxx
72					
73	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri				
74	Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx	xx	xxx
75	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx	xx	xxx
76	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri (74 s/d 75)	xxx	xxx	xx	xxx
77	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (71 + 76)	xxx	xxx	xx	xxx
78					
79	Pengeluaran Pembiayaan				
80	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri				
81	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx	xx	xxx
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
84	Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah (PMP)	xxx	xxx	xx	xxx
85	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
86	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
87	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri (81 s/d 86)	xxx	xxx	xx	xxx
88					
89	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Internasional	xxx	xxx	xx	xxx
92	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri (90 s/d 91)	xxx	xxx	xxx	xxx
93	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (87 + 92)	xxx	xxx	xxx	xxx
94	Pembiayaan Neto (77 - 93)	xxx	xxx	xxx	xxx
95					
96	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (62 + 94)	xxx	xxx	xxx	xxx

PEMERINTAH PROVINSI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan
20X0

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisa si 20X0
1	<u>PENDAPATAN</u>				
2	Pendapatan Asli Daerah:				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jmlh Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxx	xxx	xx	xxx
8					
9	Pendapatan Transfer				
10	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxx	xxx	xx	xxx
16					
17	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)	xxx	xxx	xx	xxx
21	Total Pendapatan Transfer (15 + 20)	xxx	xxx	xx	xxx
22					
23	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
24	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
25	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
26	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
27	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang	xxx	xxx	xx	xxx

28	Sah (24 s/d 26)				
	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 21 + 27)	xxx	xxx	xx	xxx
29	<u>BELANJA</u>				
30	Belanja Operasi				
31	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
32	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
33	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
34	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
35	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
36	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
37	Jumlah Belanja Operasi (31 s/d 36)	xxx	xxx	xx	xxx
38					
39	Belanja Modal				
40	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
41	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
42	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
45	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
46	Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)	xxx	xxx	xx	xxx
47					
48	Belanja Tak Terduga				
49	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
50	Jumlah Belanja tak terduga (49 sd 49)	xxx	xxx	xx	xxx
51	Jumlah Belanja (37 + 46 + 50)	xxx	xxx	xx	xxx
52					
53	<u>TRANSFER</u>				
54	Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota				
55	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
56	Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
57	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	xxx	xxx	xx	xxx
58	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota (55 s/d 57)	xxx	xxx	xx	xxx
59	Jumlah Belanja Dan Transfer (51 + 58)	xxx	xxx	xx	xxx
60					
61	SURPLUS/DEFISIT (28 - 59)	xxx	xxx	xx	xxx
62					
63	<u>PEMBIAYAAN</u>				
64					
65	Penerimaan Pembiayaan				
66	Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xx	xxx
67	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
68	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
69	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah				

	Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
70	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
71	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
72	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
73	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
74	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
75	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
76	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
77	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
78	Jumlah Penerimaan (66 s/d 77)	xxx	xxx	xx	xxx
79					
80	Pengeluaran Pembiayaan				
81	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
82	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
83	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
84	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
85	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
86	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
87	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
92	Jumlah Pengeluaran (81 s/d 91)	xxx	xxx	xx	xxx
93	Pembiayaan Neto (78 - 92)	xxx	xxx	xx	xxx
94					
95	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (61 + 93)	xxx	xxx	xx	xxx

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan
20X0

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	Anggaran 20x1	Realisasi 20x1	%	Realisasi 20x0
1	<u>PENDAPATAN</u>				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxx	xxx	xx	xxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxx	xxx	xx	xxx
16					
17	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	xxx	xxx	xx	xxx
21					
22	Transfer Pemerintah Provinsi				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx

25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxx	xxx	xx	xxx
26	Total Pendapatan Transfer (15+20+25)	xxx	xxx	xx	xxx
27					
28	Lain-Lain Pendapatan yang Sah:				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	xxx	xxx	xx	xxx
33	Jumlah Pendapatan (7 + 26 + 32)	xxx	xxx	xx	xxx
34					
35	<u>BELANJA</u>				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
38	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
39	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
40	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
41	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
42	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	xxx	xxx	xx	xxx
44					
45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
47	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
48	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
51	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
52	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	xxx	xxx	xx	xxx
53					
54	Belanja Tak Terduga:				
55	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)	xxx	xxx	xx	xxx
57	Jumlah Belanja (43 + 52 + 56)	xxx	xxx	xx	xxx
58					
59	<u>TRANSFER</u>				
60	Transfer/Bagi Hasil ke Desa				
61	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
62	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xx	xxx
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
64	Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa (61 s/d 63)	xxx	xxx	xx	xxx
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)	xxx	xxx	xx	xxx
66					
67	SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)	xxx	xxx	xxx	xxx

68					
69	<u>PEMBIAYAAN</u>				
70					
71	Penerimaan Pembiayaan				
72	Penggunaan SiLPA	xxx	xxx	xx	xxx
73	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
76	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
78	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
79	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
83	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
84	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	xxx	xxx	xx	xxx
85					
86	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
87	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
88	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx

92	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)	xxx	xxx	xx	xxx
93	Pembiayaan Neto (84 - 92)	xxx	xxx	xx	xxx
94					
95	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 93)	xxx	xxx	xx	xxx

**STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS
AKRUAL**

**PERNYATAAN NO. 03
LAPORAN ARUS KAS**

Daftar Isi

	Paragraf
Pendahuluan	1 - 7
Tujuan	1 - 2
Ruang Lingkup	3 – 4
Manfaat Informasi Arus Kas.....	5 – 7
Definisi	8
Kas Dan Setara Kas	9 - 11
Entitas Pelaporan Arus Kas	12 - 14
Penyajian Laporan Arus Kas	15 – 38
Aktivitas Operasi	21 - 26
Aktivitas Investasi	27 – 30
Aktivitas Pendanaan	31 – 34
Aktivitas Transitoris	35 – 38
Pelaporan Arus Kas Dari Aktivitas Operasi, Investasi, Pendanaan, dan Transitoris	39 – 41
Pelaporan Arus Kas Atas Dasar Arus Kas Bersih	42
Arus Kas Mata Uang Asing	43 – 45
Bunga dan Bagian Laba	46 – 49
Perolehan dan Pelepasan Investasi Pemerintah Dalam Perusahaan Negara/Daerah/Kemitraan dan Unit Operasi Lainnya	50 – 56
Transaksi Bukan Kas	57 – 58
Komponen Kas dan Setara Kas	59
Pengungkapan Lainnya.....	60 – 62
Tanggal Efektif	63 - 64
Lampiran :	
Ilustrasi Lampiran PSAP 03.A	: Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat
Ilustrasi Lampiran PSAP 03.B	: Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi
Ilustrasi Lampiran PSAP 03.C	: Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten/Kota

